

## Gagasan

- 2 Melatih Humas BPK Mengelola Informasi

## Wacana

- 3 PIK Depkumham Jadi Lokomotif Layanan Informasi ke Publik

## Senggang

- 4 Bamboedoea dalam Kaca Mata Media

# Bamboedoea Mengkomunikasikan Riset Kemitraan Australia-Indonesia



Menteri Perdagangan, Mari Pangestu dan Dubes Australia, Bill Farmer, membuka Policy Research Forum di Hotel Four Seasons, 3 Desember 2007

Mengawali bulan Desember, Bamboedoea Komunikasi berkesempatan bekerja sama dengan Australia Indonesia Governance Research Partnership (AIGRP) untuk menyelenggarakan Policy Research Forum, sebuah event berisi pemaparan 16 hasil riset kolaborasi antara peneliti Indonesia dan Australia. Penelitian-penelitian yang melibatkan sejumlah nama besar di Indonesia, seperti

Hadar Gumay dan Adrianus Meliala, ini mencakup bidang sosial, ekonomi, dan politik. Acara ini bertempat di Tenun Room, Hotel Four Seasons, Jakarta, pada tanggal 3 Desember 2007 lalu.

Konsep acara diramu dengan padat dan singkat, yaitu 16 presentasi dalam waktu kurang lebih 4 jam. Acara dipecah dalam 4 diskusi panel agar berlangsung efektif. Panel pertama ditujukan bagi riset menyangkut Desentralisasi dan Pemerintahan lokal, sedangkan panel kedua adalah mengenai Institusi pemerintahan dan Capacity Building. Sehabis coffee break, diskusi dilanjutkan dengan mengupas penelitian mengenai Pertumbuhan, Perkembangan dan Pengelolaan Ekonomi, dilanjutkan dengan panel terakhir, yaitu Modal Sosial, Masyarakat Sipil, dan Kebijakan Lokal. Melihat luasnya skop pembahasan, tidak heran kalau para undangan dari Papua pun menyempatkan datang.

Menghindari overloaded informasi untuk media, strategi media kali ini adalah mempermudah penyerapan informasi dengan Press Conference sebelum acara, yaitu pukul 08.20 – 08.50 pagi, dan memilih satu topik yang paling hangat di Indonesia untuk dipublikasikan. Duet peneliti Hadar Gumay dan Stephen Sherlock dipilih untuk mengumumkan hasil riset mereka tentang Pengembangan Administrasi Pemilihan di Indonesia. Pasangan ini didampingi Convenor AIGRP, Andrew MacIntyre, untuk memberikan latar belakang acara. Hasilnya tidak sia-sia, sebanyak 16 media massa hadir dan tujuh diantaranya – seperti Kompas dan Media Indonesia – memuat event tersebut. Jumlah tersebut termasuk tiga media Internasional, yaitu Australia Associated Press (AAP), Newsworld, dan [www.inn-world.com](http://www.inn-world.com).

Selain mengelola event dan Media Relations, Bamboedoea juga melakukan desain dan produksi seminar kit serta 16 poster penelitian dalam dua bahasa.

Poster ini kemudian ditampilkan dalam menyerupai pameran foto di depan ruangan forum, agar undangan mendapat pandangan menyeluruh sebelum pembahasan dimulai.

## Membangun Good Governance

Kolaborasi riset adalah sebuah ide yang ter-cetus di Canberra, 4 April 2005, dalam sebuah diskusi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; Menteri Pendidikan, Bambang Sudibyo; Vice Chancellor dari Australia National University (ANU); Menteri Perdagangan, Mari Pangestu dan Prof. Andrew MacIntyre. Ide ini kemudian ditindaklanjuti oleh ANU dan Australia Indonesia Partnership (AIP) dengan membentuk AIGRP.

Diskusi beranjak dari kesepakatan bahwa penelitian itu penting sebagai bahan dasar perumusan kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan yang bertumpu pada hasil riset di masyarakat akan membangun tata pemerintahan yang lebih baik karena sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Akhirnya, sebuah gabungan peneliti Indonesia dan Australia dilaksanakan untuk mengadakan riset tentang Indonesia, sehingga bukan hanya membangun Good governance, tapi juga mengembangkan hubungan baik Indonesia-Australia.



"Research Coordinator AIGRP, Ben Hillman, memberikan apresiasi untuk peneliti yang baru selesai mempresentasikan hasil riset"





Heri Rakhmadi

### KOMUNIKASI 3 BULAN

Ada fenomena unik di Indonesia yang terjadi di setiap akhir tahun selama 3 bulan, Oktober, November dan Desember. Di waktu-waktu ini, banyak instansi pemerintah mendadak giat membuat program komunikasi, mulai dari Iklan Layanan Masyarakat (ILM), talkshow, diskusi, seminar sampai pembuatan feature pendek di stasiun televisi. Fenomena ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa sosialisasi ini baru gencar dilaksanakan pada akhir tahun?

Ternyata dalah yang selalu dijadikan alasan! Akhir tahun adalah akhir masa anggaran, dan jika dana tidak terpakai, akan hangus. Maka program komunikasi pun menjadi cara mudah untuk menghabiskan dana yang ada. Secara teknis administratif, tentu hal ini sah-sah saja. Namun dilihat dari kaca mata komunikasi tindakan ini menggelikan!

Meski mendapat porsi besar, seperti pelaksanaan talkshow yang mahal atau iklan di televisi yang biayanya tidak sedikit, merapel program komunikasi selama 3 bulan seperti yang lazim terjadi pasti tidak akan efektif dan efisien karena melanggar berbagai prinsip komunikasi.

Prinsip yang dimaksud adalah repetisi, yaitu komunikasi akan efektif jika pesan disampaikan berulang-ulang kepada kelompok sasaran yang sesuai pada waktu yang tepat. Prinsip kedua adalah kesinambungan. Bandingkan sosialisasi yang dilaksanakan selama setahun penuh, dengan penayangan iklan layanan masyarakat dalam waktu 3 bulan. Pesan tersebut tidak akan melekat lama di benak masyarakat apalagi untuk mengubah perilaku.

Prinsip ketiga adalah efektifitas dan efisiensi komunikasi. Overload Informasi akan membuat masyarakat tidak fokus pada satu informasi tertentu, melainkan hanya menyerap sedikit-sedikit atau bahkan tidak memperhatikan semuanya. Inilah yang terjadi ketika semua instansi pemerintah serentak membuat program komunikasi di akhir tahun. Analoginya adalah seperti menatap satu halaman yang dipenuhi 20 iklan, manakah yang anda perhatikan? Atau justru halaman tidak diperhatikan karena membuat pusing? Apalagi akhir tahun yang selalu bertepatan dengan berbagai Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru identik dengan jor-joran iklan berbagai produk.

Beranjak dari tiga aturan penting tersebut, masihkah kita, khususnya instansi pemerintahan, selalu terjebak dengan kondisi ini? Seperti menggarami lautan! Tidakkah ada cara lain agar penganggaran dan program komunikasi bisa kontinyu? Atau bisa jadi kita sedang menikmati kondisi ini? Wallahualam bissawab....hanya Tuhan yang tahu.

# Melatih Humas BPK Mengelola Informasi



Masyarakat, perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pekanbaru tampak tergepoh-gepoh memasuki Ruang Utari Parikesit di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, pagi itu. Perempuan berkerudung merah muda ini adalah salah satu dari 11 perwakilan dari BPK seluruh Indonesia untuk menghadiri Pelatihan Peningkatan Keterampilan Kehumasan, yang dipercayakan pengelolaannya pada Bamboedoea Komunikasi. Selain 11 perwakilan, pelatihan ini juga diikuti oleh 36 peserta dari kantor pusat Humas dan Luar Negeri BPK-RI.

Pelatihan ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri BPK-RI, mengingat besarnya kebutuhan informasi di lingkungan internal dan eksternal. Diharapkan, peserta pelatihan ini tidak hanya bisa memproduksi informasi, tapi juga mengelola dan menyajikannya melalui media yang tepat.

Melihat kebutuhan ini, maka materi yang paling awal disampaikan adalah tentang Manajemen Media Center, yang disampaikan Direktur Bamboedoea Komunikasi, Heri Rakhmadi. Dengan ringkas, Heri memaparkan konsep dan aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Peserta pun cepat merespon dengan menanyakan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi dalam sebuah Media Center.

Sesi selanjutnya adalah mengenai Public Campaign untuk Instansi Pemerintah yang disampaikan Konsultan Komunikasi, Hifni Alifahmi. Beberapa kali bekerja sama

dengan aparat pemerintahan membuat Bamboedoea memiliki perbandingan akan kebutuhan masing-masing instansi serta budaya birokrasi. Materi tentang Publikasi, publisitas dan pengelolaan media internal, dibawakan selanjutnya oleh Agus Priyanto, praktisi media yang kini menjadi salah satu Analis di Media Center Depkumham. Pembawaannya yang selalu bersemangat menjadi sumber energi tersendiri bagi para peserta. Agus Priyanto pula yang mengisi materi di hari kedua untuk teknik penulisan sebagai kemampuan dasar humas.

Mengisi sesi terakhir sehabis makan malam adalah Andi Irmam, Konsultan media Bamboedoea yang sudah lama menggeluti Media Relations. Kali ini, Andi lebih menyoroti Media Monitoring dan Analisis sebagai action dasar pengambilan kebijakan komunikasi. Peserta menjadi lebih terlibat karena penyampaian sangat praktis dan aplikatif.



Konsultan Komunikasi Bamboedoea, Hifni Alifahmi, memberikan materi mengenai dasar kehumasan dan teknik identifikasi masalah komunikasi

# PIK Depkumham Jadi Lokomotif Layanan Informasi ke Publik

Sumber: [www.hukumham.info](http://www.hukumham.info)

Bertepatan dengan ulang tahun Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) atau yang lazim disebut Hari Dharma Karyadhika, Depkumham memiliki Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Andi Mattalatta mengharapkan PIK menjadi lokomotif dalam penyajian informasi kepada publik.

"Saya berharap dengan adanya PIK, Depkumham menjadi pionir sekaligus lokomotif bagi departemen lainnya dalam penyajian informasi kepada publik. PIK ini sebagai kado ulang tahun yang sungguh berarti bagi Depkumham," ungkap Andi dalam sambutannya ketika meresmikan PIK di Gedung Pengayoman, Depkumham, Jakarta.

Peresmian PIK Depkumham dihadiri oleh pejabat tinggi dari beberapa departemen dan pejabat di lingkungan Depkumham, pengamat dan tokoh masyarakat, serta tokoh kehumasan dan media. Acara ini ditandai dengan kunjungan para undangan untuk melihat aktivitas fasilitas yang tersedia di PIK Depkumham.

Menkumham menyatakan kebanggaannya Depkumham memiliki PIK atau media center. PIK merupakan langkah nyata Depkumham dalam mengantisipasi diundangkannya Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP). "Depkumham mempunyai komitmen dan tampil terdepan dalam merespons RUU tersebut," kata Andi.

Setelah diresmikannya PIK, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi di Depkumham, mulai dari rancangan undang-undang hingga pelayanan lainnya. Publik juga dapat menyampaikan aspirasi terkait proses pembentukan undang-undang dan apirasi lainnya melalui fasilitas email dan pesan layanan pendek (sms). "Dan yang lebih penting lagi, melalui PIK, publik dapat berpartisipasi pada proses legislasi dan sosialisasi produk perundang-undangan yang dihasilkan."

Untuk mendukung program PIK, Menkumham menginstruksikan kepada seluruh jajaran Depkumham untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dengan cara memasok data secara kontinyu dan transparan kepada pengelola PIK. Selain itu, para pejabat diharapkan secara rutin untuk memberikan informasi terkait dengan program-program yang sedang dan akan dijalankan oleh Depkumham.

PIK merupakan satu dari empat tema program Enhancing



*Peresmian PIK Depkumham secara simbolis dengan SMS Broadcast ke seluruh tamu oleh Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta didampingi Sekjen Depkumham Prof. A. Bari Azed, Heri Rakhmadi (Bamboedoea), Nurina Widagdo (UNDP) dan Dr. Wahiduddin Adams (NPD Cappler).*

mendukung program PIK, Menkumham menginstruksikan kepada seluruh jajaran Depkumham untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dengan cara memasok data secara kontinyu dan transparan kepada pengelola PIK. Selain itu, para pejabat diharapkan secara rutin untuk memberikan informasi terkait dengan program-program yang sedang dan akan dijalankan oleh Depkumham.

PIK merupakan satu dari empat tema program Enhancing mengadvokasi pembaruan hukum serta HAM. Kegiatan ketiga menyangkut dukungan terhadap mekanisme yang efektif dan efisien dalam rangka partisipasi publik dalam proses pembuatan legislasi. "Kegiatan lainnya adalah dukungan terhadap pembuatan rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas Depkumham dalam reformasi hukum dan hak asasi manusia," kata Wahiduddin Adams, National Project Director Cappler yang juga menjabat Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham.

Heri Rakhmadi, Direktur Bamboedoea Communications, yang mengelola PIK Depkumham, menjelaskan bahwa PIK merancang dan mengeksekusi program komunikasi terpadu. "Publik diharapkan mampu mendapatkan informasi lengkap mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan program lainnya di Depkumham," kata Heri.

Heri menjelaskan, kegiatan PIK terdiri atas tiga aktivitas, yaitu media center, information center, dan konsultan kehumasan. Unit media center memberikan pelayanan informasi dan penyediaan fasilitas yang lengkap (ruang kerja, komputer, internet) untuk wartawan serta memonitor pemberitaan media yang terkait dengan Depkumham. Sementara unit information center menyiapkan dan mengolah data dan informasi dinamis.

tersebut, PIK Depkumham dikelola oleh tim profesional yang melibatkan praktisi kehumasan, media, dan hukum. Selama enam bulan pertama tim Bamboedoea selaku konsultan menyiapkan infrastruktur dan platform kehumasan. Setelah itu dilakukan rekrutmen dan pelatihan calon pengelola PIK yang berasal dari PNS Depkumham. Kemudian dijalankan program pendampingan teknis dan juga transisi pengelolaan. Setelah itu, PIK akan dikelola sepenuhnya oleh Depkumham



*Suasana persiapan sebelum peresmian PIK Depkumham dimulai*

Communication Advocacy and Public Participation for Legal Reforms (Cappler) selama dua tahun (2006–2008) yang mendapat dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP).

Dalam menjalankan kegiatan utamanya, PIK menyebarluaskan informasi yang terkait dengan produk maupun kegiatan yang dilakukan oleh Depkumham. Kegiatan kedua adalah membangun kapasitas internal Depkumham di bidang keahlian teknis hukum dan untuk



## Bamboedoea dalam Kacamata Media



Artikel feature mengenai Bamboedoea Komunikasi dan perjalanannya di majalah B&B, Marketing Mix dan Harian Rakyat Merdeka



Prestasi Bamboedoea meraih IPRA Award 2007 di Bali, awal September lalu membuat beberapa media bersegregmen marketing dan public relations tertarik untuk mengulik lebih jauh. Marketing Mix edisi 10 yang terbit 23 Oktober 2007 lalu misalnya, mengulas lebih dalam keberhasilan Media Center Pilkada Aceh yang dinilai berperan besar dalam penyelenggaraan Pilkada yang aman dan damai, meski sebelumnya berbagai konflik diprediksi terjadi.

Beranjak dari latar belakang Aceh itulah Bamboedoea merumuskan strategi komunikasi khusus, yang kemudian dipecah menjadi Media relations; database management; sosialisasi dan publikasi; dan mobilisasi sosial. Semua ini tidak dijalankan oleh tim besar, melainkan tim kecil yang solid dan koordinasi terus menerus. "Prinsipnya adalah bekerja sama dan sama-sama bekerja" ujar Direktur Bamboedoea Komunikasi, Heri Rakhmadi dalam majalah ini

Lain lagi dengan Majalah B&B edisi Oktober 2007 ini. Mengawali cerita dengan kemenangan di IPRA Award, B&B menyorot lebih dalam sejarah perjalanan Bamboedoea sebagai pengelola Media Center untuk Pemilu. Mulai dari pendirian Press Center di Pemilu 1999; Media Center

Pilkada Depok; sampai Media Center Pemilu 2004. Selain itu, Bamboedoea juga menangani beberapa program di Perum Bulog, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan, yang terakhir, adalah Pusat Informasi dan Komunikasi Departemen Hukum dan HAM.

Tidak hanya di majalah, kesuksesan meraih IPRA Award juga diberitakan oleh beberapa Media Online dan cetak, namun umumnya bersifat hardnews yang muncul sehari setelah pemberian penghargaan. Sebut saja, Medan Bisnis Online, [www.serambinews.com](http://www.serambinews.com), Aceh Recovery Forum, dan bahkan media internasional seperti focus press. Media cetak lain yang memuat adalah Suara Karya, yang juga memberitakan di situs resmi mereka. Semua ini tidak lain karena Bamboedoea dinilai berhasil menjalankan Media Center KIP Aceh dengan sukses sehingga Pilkada Aceh menjadi kemenangan semua pihak.

Terakhir, Rakyat Merdeka menulis profil Direktur Bamboedoea Komunikasi, Heri Rakhmadi, yang berpengalaman menjadi Team Leader Press Center Pemilu 1999, Sosialisasi Terpadu dan Media Center Pemilu 2004, dua pemilu paling demokratis dan aman dalam sejarah pemilu di Indonesia.

### Komunikartun by baloemar

